

PEMENUHAN ASPEK HUKUM PADA KELENGKAPAN *INFORMED CONSENT* TERHADAP KESIAPAN AKREDITASI SNARS EDISI I DI RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTA MAGELANG
FULFILLMENT OF THE LEGAL ASPECTS ON THE COMPLETENESS OF THE *INFORMED CONSENT* ARE AGAINST ACCREDITATION READINESS
SNARS EDITION I IN RSU TIDAR MAGELANG
Revadia Zikri Syukria¹, Sis Wuryanto²

INTISARI

Latar Belakang : Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan harus mendapatkan persetujuan dari pasien maupun keluarganya ketika akan dilakukan tindakan kedokteran. Pelaksanaan serta pengisian bagian/item dalam *informed consent* yang terpenuhi secara lengkap dapat dijadikan sebagai alat bukti dan perlindungan hukum serta mendukung untuk penilaian akreditasi rumah sakit. Berdasarkan Studi Pendahuluan pada tanggal 15 Mei 2019 di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang kelengkapan *informed consent* masih terdapat beberapa yang belum ataupun tidak terisi. Berdasarkan 15 sampel *informed consent* pemberian informasi dan persetujuan tindakan sebesar 33% pemberian informasi tidak lengkap dan 67% persetujuan tidak lengkap.

Tujuan Penelitian : Mengetahui kelengkapan *informed consent* terhadap kesiapan akreditasi SNARS Edisi I di RSU Tidar Kota Magelang

Metode Penelitian : Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Hasil Penelitian : Kelengkapan *informed consent* dalam analisis kelengkapan identitas sosial pasien dalam pemberian informasi memiliki persentase kelengkapan sebesar 90,5% dan persetujuan tindakan sebesar 92,5% dalam kelengkapan bukti rekaman *informed consent* memiliki kelengkapan sebesar 85,8% serta dalam bukti keabsahan memiliki persentase sebesar 73,1%. Regulasi umum terkait *informed consent* yang berlaku berupa peraturan direktur serta standar prosedur operasional namun dari pelaksanaan regulasi belum berjalan maksimal karena belum ada kepatuhan dokter dalam melaksanakan pengisian serta belum ada regulasi tentang kewenangan pengisian *informed consent*.

Kesimpulan :. Persentase kelengkapan *informed consent* dari segi pemberian informasi dan persetujuan sebagian besar belum memenuhi standar kelengkapan 100% hal tersebut mempengaruhi penilaian akreditasi dokumen (D). Pelaksanaan regulasi *informed consent* di RSU Tidar Magelang sudah berjalan namun belum ditetapkan regulasi *informed consent* tentang kewenangan pengisian persetujuan tindakan

Kata Kunci : Kelengkapan, *Informed Consent*, Akreditasi

¹ Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Pembimbing Program Studi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PEMENUHAN ASPEK HUKUM PADA KELENGKAPAN *INFORMED CONSENT* TERHADAP KESIAPAN AKREDITASI SNARS EDISI I DI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

FULFILLMENT OF THE LEGAL ASPECTS ON THE COMPLETENESS OF THE *INFORMED CONSENT* ARE AGAINST ACCREDITATION READINESS SNARS EDITION I IN RSUD TIDAR MAGELANG

Revadia Zikri Syukria¹, Sis Wuryanto²

ABSTRACT

Background: *The hospital has an obligation to convey the correct information and must obtain the consent of the patient or his family when the action will be performed. Implementation as well as the charging section/items in informed consent are fulfilled in full can be used as a means of proof and the protection of the law and support for assessment accreditation of hospitals. Based on Preliminary Studies on May 15, 2019 at a public hospital Tidar Magelang completeness of the informed consent still there are some that are not yet loaded or not. Based on 15 sample informed consent the granting of information and approval of the actions of 33% the grant information is incomplete and 67% approval is not complete.*

Research Objectives: *Knowing the completeness of the informed consent against preparedness accreditation SNARS Edition I in RSUD Tidar Magelang*

Research Methods: *The research method used is descriptive research with qualitative approach*

Research Results: *Completeness of informed consent within the thoroughness of the analysis of the social identity of the patients in the giving of the information have a percentage of completeness of 90.5% and 92.5% of action approval in recording evidence informed consent has the completeness of 85.8% as well as in the proof of the validity of having a percentage of 73.1%. General Regulation-related informed consent that applies in the form of regulatory standard operating procedures as well as the Director of the implementation of the regulation is not yet running at maximum because there has not been compliance with doctors in carrying out replenishment as well as are not yet There is a regulation about the charging authority informed consent.*

Conclusion: *percentage of completeness informed consent in terms of the giving of the information and the approval of the majority has not met the standard 100% completeness of the foregoing influence assessment accreditation documents (D). The implementation of the regulation of informed consent in General Hospital tidar magelang has been running but have not set regulations informed consent about the charging authority approval action*

Keywords: *Completeness, Informed Consent, Accreditation*

¹ *Students of Medical Record And Health Information Study Program Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta*

² *Lecturer of Medical Record And Health Information Study Program Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta*